**ABSTRAK**

Masyarakat Kota Depok yang heterogen membentuk organisasi secara sukarela sebab keinginan menyampaikan aspirasi berdasarkan kesamaan kehendak dan kepentingan. Namun pelaksanaan perizinan pendirian Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 terdapat permasalahan. Sehingga penulis mengambil judul Laporan Akhir **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESENTRALISASI PERIZINAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT”**

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui implementasi kebijakan, faktor penghambat implementasi kebijakan menggunakan teori Grindle, serta merumuskan upaya Pemerintah Kota Depok dalam mengatasi masalah dalam pelaksanaan kebijakan.

Penelitian ini mengguanakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data meliputi informan, peneliti serta dokumen yang terkait dengan obyek penelitian. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil magang dan pengolahan data disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Resentralisasi Perizinan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Depok belum optimal. Sebab pelaksanaan kebijakannya dihambat beberapa faktor diantaranya tujuan dan kinerja kebijakan serta strategi kebijakan yang belum berjalan baik. Upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan adalah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Kementerian atau Lembaga terkait. Penulis menyarankan dalam pelaksanaan kebijakan perizinan organaisasi kemasyarakatan agar lebih tegas dan pro aktif dalam pengawasan dan pembinaan ormas di Depok.

**ABSTRACT**

Depok heterogeneous society organizations formed voluntary because the desire to convey the aspirations based on common will and interests. However, the implementation of licensing of establishment of the Community Organization based on Government Regulation Number 58 year 2016 there is a problem. So the authors take the title of Final Report "**THE RESENTRALIZATION IMPLEMENTATION POLICY OF LICENSING MASS ORGANIZATION ON DEPOK CITY WEST JAVA PROVINCE**"

The research focused on the implementation of policy, factor inhibiting of policy implementation using Grindle theory, and formulating the efforts of Depok City Government to tackle the problem in the implementation of policy.

This research uses qualitative research design with descriptive method of inductive approach. Data collection technical are using interviews, documentation and observation. Data sources include informants, researchers and documents related to the research object. Data analysis technical is data reduction, data display and conclusion.

Based on the results of this research and data processing, it is concluded that The Resentralization Implementation Policy of Licensing Mass Organizationhas not been optimal yet. Because of the policy implementation is inhibited by factors such as policy objectives and performance and policy strategies that have not gone well. The efforts Government to overcome the problem is to socialize and coordinate with the Ministry or related Institution. The authors suggest in the implementation of the policy of licensing community organizations to be more assertive and proactive in the supervision and development of mass organizations in Depok.